

ANALISIS KEMISKINAN STRUKTURAL, PANGAN LOKAL, DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Structural Poverty, Local Food, and Community Food Security in North Central Timor Regency within the Perspective of Sustainable Development

Fernando Kobesi^{1,a)}, Fransina W. Ballo^{2,b)}, Cicilia A. Tungga^{3,c)}

^{1,2,3}) Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Koresponden : a) fnndkobesi45@gmail.com, b) fransinaballo@staf.undana.ac.id,

c) ciciliatungga@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Kemiskinan struktural dan ketahanan pangan merupakan dua persoalan pembangunan yang saling berkaitan dan terus mengungkgung masyarakat pedesaan di wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses sumber daya dan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kemiskinan struktural terhadap ketahanan pangan masyarakat, mengidentifikasi jenis pangan lokal yang dikembangkan, serta mengkaji bentuk partisipasi dan kolaborasi masyarakat-pemerintah dalam pengentasan kemiskinan berbasis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan yang dipilih secara purposive, yaitu pejabat Bapperida, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, serta petani/rumah tangga miskin, ditambah observasi lapangan dan dokumentasi. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman. Temuan menunjukkan bahwa kemiskinan di TTU bersifat struktural dan persisten, berakar pada keterbatasan akses lahan produktif, rendahnya kualitas SDM, minimnya infrastruktur, serta dominasi pertanian subsisten lahan kering. Kondisi ini secara langsung melemahkan ketahanan pangan rumah tangga. Pangan lokal seperti jagung, ubi kayu, sorgum, dan ubi jalar memiliki potensi strategis, namun pemanfaatannya masih subsisten dan minim nilai tambah. Partisipasi masyarakat dalam program pemerintah masih didominasi oleh posisi pasif penerima manfaat. Disimpulkan bahwa penguatan pangan lokal dalam kerangka pembangunan berkelanjutan memerlukan sinergi kebijakan integratif antara pemerintah dan masyarakat.

Kata Kunci : Kemiskinan Struktural, Ketahanan Pangan, Pangan Lokal, Pembangunan Berkelanjutan, Partisipasi Masyarakat

PENDAHULUAN

Kemiskinan struktural dan ketahanan pangan merupakan dua tantangan pembangunan yang saling mempererat satu sama lain, terutama di kawasan pedesaan yang rentan terhadap keterbatasan akses sumber daya, minimnya infrastruktur, dan lemahnya kelembagaan lokal. Di Indonesia, kemiskinan tidak sekadar mencerminkan rendahnya pendapatan, melainkan

juga mencerminkan ketidakmampuan multidimensi dalam mengakses layanan dasar, pendidikan, dan peluang ekonomi yang layak (Dewi dkk., 2024). Persoalan ini semakin pelik ketika instabilitas pangan turut menekan kualitas hidup masyarakat, membentuk sebuah lingkaran setan yang sulit diputus.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara konsisten mencatat angka kemiskinan di atas rata-rata nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025), persentase penduduk miskin NTT pada Maret 2025 tercatat sebesar 18,60 persen, menempatkan provinsi ini pada urutan keenam dari sepuluh provinsi dengan kemiskinan tertinggi di Indonesia (Ahdiat, 2025). Di tingkat kabupaten, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mencatat persentase kemiskinan sebesar 20,17 persen pada tahun 2025, jauh melampaui rata-rata nasional sebesar 8,47 persen maupun rata-rata provinsi. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari akumulasi keterbatasan struktural yang berlangsung lintas generasi.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara diperparah oleh dominasi lahan kering yang mencapai 199.583,2 hektar atau sekitar 74,7 persen dari total luas wilayah pada tahun 2025. Lebih dari separuh angkatan kerja menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian tadah hujan dengan produktivitas rendah dan rentan terhadap perubahan iklim. Minimnya teknologi, keterbatasan akses modal, dan infrastruktur yang belum memadai menjadi faktor-faktor struktural yang menghalangi masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan lokal yang sesungguhnya berlimpah, seperti jagung, ubi kayu, sorgum, dan berbagai umbi-umbian lokal.

Berbagai penelitian terdahulu tentang kemiskinan dan ketahanan pangan di Indonesia cenderung bersifat konseptual dan berskala nasional, bersifat konseptual karena hanya menggunakan studi literatur, tidak menggunakan data primer, tidak mengukur efektivitas strategi yang dibahas dan belum memberikan model implementasi yang aplikatif pada tingkat daerah maupun nasional. (Siregar dkk., 2025). Kelemahan penelitian Sembiring dkk., (2026) fokus hanya mengukur ketahanan pangan rumah tangga petani menggunakan Food Consumption Score (FCS), sehingga belum mengakomodasi faktor-faktor struktural seperti kemiskinan, akses terhadap sumber daya produktif, kebijakan pembangunan, dan pemanfaatan pangan lokal yang memengaruhi ketahanan pangan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini kajian secara spesifik menelaah kemiskinan struktural dan ketahanan pangan berbasis data primer lapangan di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara masih sangat terbatas. Kekosongan empiris inilah yang menjadi novelty dan justifikasi akademis penelitian ini: mengkaji secara kontekstual dan berbasis data lapangan bagaimana kemiskinan struktural mempengaruhi ketahanan pangan, pangan lokal apa yang dikembangkan, serta bagaimana partisipasi dan kolaborasi masyarakat-pemerintah dapat dioptimalkan menuju pembangunan berkelanjutan yang inklusif di Kabupaten Timor Tengah Utara.

KAJIAN TEORI

Kemiskinan Struktural

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang melampaui rendahnya pendapatan. Suparmono (2018) membedakan kemiskinan ke dalam dua tipologi utama: kemiskinan kultural yang bersumber dari kebiasaan dan pola pikir masyarakat, serta

kemiskinan struktural yang timbul dari kondisi alam dan sistem yang tidak menguntungkan, mencakup lahan yang gersang, lokasi terpencil, kekurangan sumber daya, dan minimnya fasilitas publik. Kabupaten TTU dengan dominasi lahan kering dan topografi berbukit merupakan representasi konkret dari kemiskinan struktural dimaksud.

Pendekatan Sen (1981) melalui konsep *entitlement failures* memberikan perspektif tambahan yang relevan: kemiskinan dan kelaparan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya produksi pangan, tetapi oleh kegagalan akses *entitlement* kemampuan seseorang untuk memperoleh komoditas melalui mekanisme yang tersedia dalam masyarakat. BPS (2025) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar pangan maupun nonpangan, diukur menggunakan pendekatan *Cost of Basic Needs* (CBN) dengan Garis Kemiskinan (GK) sebagai ambang batas pengeluaran minimum per kapita. World Bank (2022) memperluas dimensi kemiskinan di luar aspek moneter, mencakup ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan perumahan layak.

Suparmono (2018) menggambarkan dinamika kemiskinan struktural melalui konsep lingkaran kemiskinan yang kejam (*vicious circle of poverty*): rendahnya kualitas SDM menyebabkan produktivitas rendah, yang menghasilkan pendapatan minim, menghambat tabungan dan investasi produktif, dan pada akhirnya mereproduksi rendahnya kualitas SDM generasi berikutnya. Lingkaran ini bukan sekadar teori, melainkan realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat petani Kabupaten TTU. Chambers (1983) dalam teori *Sustainable Livelihood Framework* menambahkan bahwa kerentanan terhadap guncangan eksternal, kekeringan, gagal panen, fluktuasi harga memperparah perangkap kemiskinan struktural, terutama bagi mereka yang tidak memiliki aset cadangan yang memadai.

Kajian internasional memperkuat pemahaman bahwa kemiskinan struktural bersifat multidimensional dan terus menjadi prioritas pembangunan global. Tinjauan sistematis Ruja, Sumarmi, dan Idris (2024) atas dua puluh dua artikel terindeks Scopus dan Web of Science menemukan bahwa program pengentasan kemiskinan paling efektif ketika diarahkan secara terintegrasi pada pemberdayaan ekonomi lokal, penguatan infrastruktur, dan keterlibatan perempuan, sejalan dengan pencapaian target *Sustainable Development Goals*. Nyamamu, Nchimbi, Mteti, dan Ndimbo (2025) menambahkan bahwa di kawasan rural negara berkembang, kemiskinan terus direproduksi oleh terbatasnya diversifikasi mata pencaharian dan tingginya ketergantungan pada pertanian subsisten skala kecil, kondisi yang relevan dengan karakteristik struktural Kabupaten TTU. Dari perspektif sosiologis, Klimczuk, Gawron, dan Toczyski (2024) menegaskan bahwa pencapaian SDG 1 (*No Poverty*) memerlukan kerangka kebijakan yang memperhitungkan ketahanan sosial dan ketidakadilan struktural, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi agregat sebuah penegasan konseptual yang melengkapi argumen Suparmono (2018) dan Chambers (1983) di atas.

Ketahanan Pangan dan Pangan Lokal

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara hingga perseorangan, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, bermutu, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Definisi ini mengandung empat pilar utama yang harus dipenuhi secara simultan: ketersediaan (*availability*), akses (*access*), pemanfaatan (*utilization*), dan stabilitas (*stability*). Pangan lokal mencakup komoditas sereal seperti jagung, umbi-umbian seperti ubi kayu dan

ubi jalar, kacang-kacangan, serta sorgum merupakan komponen strategis dalam membangun ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal.

Siregar dkk. (2025) menegaskan bahwa komoditas pangan lokal seperti jagung, sorgum, dan umbi-umbian mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pedesaan yang menghadapi kemiskinan struktural, namun potensi ini hanya dapat terealisasi apabila didukung kebijakan adaptif, penguatan kelembagaan, dan pengembangan teknologi pascapanen. Salsabela dkk. (2024) menambahkan bahwa masyarakat yang mengandalkan pangan lokal cenderung lebih tahan terhadap krisis ekonomi dan perubahan iklim, meskipun ketahanan tersebut sangat bergantung pada pemerataan akses dan pengelolaan yang optimal. Suleman dkk. (2025) menegaskan bahwa pangan tidak hanya berfungsi sebagai sumber nutrisi, tetapi juga berperan dalam pembentukan identitas sosial, budaya, dan stabilitas ekonomi suatu komunitas.

Secara konseptual, Pinstrup-Andersen (2009) menegaskan bahwa ketahanan pangan harus dimaknai secara multidimensional, mencakup ketersediaan, akses fisik dan ekonomi, serta pemanfaatan pangan yang aman dan bergizi, sementara Godfray dkk. (2010) memperingatkan bahwa tantangan menyediakan pangan bagi populasi yang terus bertambah memerlukan transformasi sistem produksi yang berkeadilan, bukan sekadar peningkatan output. Kajian bibliometrik Li dan Song (2022) atas literatur ketahanan pangan tahun 1991–2021 menunjukkan pergeseran fokus riset global dari aspek ketersediaan menuju aspek akses dan stabilitas, sejalan dengan tinjauan multidimensional Righettini dan Bordin (2022) yang menegaskan bahwa ketahanan pangan kontemporer tidak dapat dipisahkan dari dimensi keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Webb dkk. (2020) menegaskan urgensi transformasi sistem pangan global secara menyeluruh agar tidak hanya berorientasi produksi, tetapi juga berkelanjutan dan inklusif. Temuan empiris dari konteks pertanian skala kecil memperkuat relevansi perspektif tersebut bagi TTU: Wudil dkk. (2023) di Nigeria menemukan bahwa akses penyuluhan, luas lahan, dan pendapatan usaha tani menjadi determinan utama ketahanan pangan rumah tangga petani, sementara Hlatshwayo dkk. (2023) di Afrika Selatan membuktikan bahwa produktivitas lahan kering berkorelasi langsung dengan ketahanan pangan dan gizi masyarakat tani, pola yang sejalan dengan kondisi pertanian lahan kering di Kabupaten TTU.

Pada ranah sistem pangan lokal (*local food systems*), tinjauan dua dekade penelitian oleh Enthoven dan Van den Broeck (2021) menyimpulkan bahwa sistem pangan lokal berkontribusi nyata terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga tani, ketahanan ekologis, dan kohesi sosial komunitas, meskipun manfaat tersebut sangat ditentukan oleh tata kelola rantai nilai dan akses pasar. Westskog (2024) melalui studi kasus di tiga kotamadya rural Norwegia menemukan bahwa sistem pangan lokal yang kuat tumbuh dari hubungan resiprokal antara produsen dan konsumen yang berbasis kepercayaan dan akuntabilitas bersama, bukan sekadar transaksi ekonomi semata. Sejalan dengan itu, Alessandrini (2024) menyoroti bahwa kebijakan pertanian yang berorientasi pada petani skala kecil termasuk insentif produksi pangan lokal berperan penting dalam transisi menuju sistem pangan yang berkelanjutan, sekaligus menjaga keragaman agrobiodiversitas dan warisan budaya pangan. Ketiga kajian ini memberi landasan konseptual bagi argumen bahwa penguatan pangan lokal di Kabupaten

TTU bukan sekadar strategi subsistensi darurat, melainkan instrumen pembangunan ekonomi dan sosial jangka panjang.

Pembangunan Berkelanjutan

Embang (2025) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial demi memenuhi kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Lima prinsip dasar pembangunan berkelanjutan yang relevan mencakup keberlanjutan lingkungan, efisiensi sumber daya, keadilan sosial, partisipasi publik, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Prinsip partisipasi publik menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, sementara keadilan sosial mensyaratkan akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat.

Literatur internasional menegaskan keterkaitan erat antara pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan-gizi sebagai dua pilar yang tidak terpisahkan dalam pencapaian SDGs. Beckford, Al Jawaldeh, dan Lipoeto (2024) menekankan bahwa pencapaian SDG 1 (*No Poverty*) tidak dapat dilepaskan dari intervensi gizi dan ketahanan pangan rumah tangga, mengingat kemiskinan dan kekurangan gizi saling memperkuat dalam siklus yang sulit diputus. Sejalan dengan itu, Hefferon, Downs, Oms Oliu, dan De Steur (2021) menegaskan bahwa pencapaian target-target SDGs secara keseluruhan sangat bergantung pada perbaikan sistem pangan dan status gizi masyarakat, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur pertanian. Kedua kajian ini memperkuat argumen Embang (2025) di atas bahwa pembangunan berkelanjutan bersifat multidimensional, dan menegaskan bahwa penguatan pangan lokal sebagaimana dibahas pada subbab sebelumnya merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten TTU.

Teori Malthus dalam Konteks Kemiskinan dan Pangan Lokal

Thomas Robert Malthus dalam *Essay on the Principle of Population* (1798) berargumen bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sementara kapasitas produksi pangan hanya tumbuh secara deret hitung. Tekanan ini pada akhirnya menciptakan kemiskinan dan kerawanan pangan. Purba dkk. (2024) menegaskan bahwa teori Malthus relevan sepanjang pertumbuhan penduduk tidak diimbangi peningkatan produktivitas pangan. Ramadani (2025) menegaskan relevansinya dalam konteks Indonesia, khususnya di wilayah dengan stagnasi kapasitas produksi pangan akibat keterbatasan teknologi dan modal. Namun, Sen (1981) mengkritisi pandangan Malthus dengan menekankan bahwa krisis pangan lebih banyak disebabkan oleh kegagalan distribusi dan akses daripada semata-mata kekurangan produksi, sebuah perspektif yang sangat relevan untuk memahami kondisi TTU.

Relevansi tesis Malthus (1798) perlu didampingi kajian modern yang mengkritisi sekaligus mengembangkan asumsi dasarnya. Unat (2020) dalam tinjauannya terhadap teori populasi Malthus dari sudut pandang *human capital* menegaskan bahwa prediksi Malthus tentang krisis pangan akibat pertumbuhan penduduk gagal memperhitungkan peran investasi pada kualitas sumber daya manusia dan inovasi teknologi pertanian, sebagaimana terbukti pada era Revolusi Hijau yang melipatgandakan produktivitas pangan jauh melampaui proyeksi deret

hitung Malthus. Heavey (2022) memperkuat kritik ini dengan menyatakan bahwa logika dasar Malthusian tentang keterbatasan pangan tidak didukung secara empiris, melainkan lebih banyak didorong oleh kekhawatiran eksistensial ketimbang bukti produksi pangan aktual, mengingat kemajuan teknologi pertanian secara konsisten mampu menggeser ambang batas kapasitas produksi. Kedua kajian ini menegaskan bahwa di Kabupaten TTU, kerawanan pangan yang terjadi bukanlah cerminan tepat dari perangkat Malthusian klasik, melainkan sejalan dengan kritik Sen (1981) di atas—lebih disebabkan oleh stagnasi teknologi, keterbatasan investasi pada kualitas SDM petani, dan kegagalan distribusi serta akses, bukan oleh keterbatasan kapasitas biofisik lahan itu sendiri.

Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertitik tolak dari pemahaman bahwa kemiskinan struktural di Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan akibat dari kegagalan sistem sosial, ekonomi, dan kelembagaan dalam menyediakan akses yang setara terhadap sumber daya produktif. Keterbatasan tersebut mencakup minimnya akses terhadap lahan produktif, modal, teknologi pertanian, pendidikan, dan infrastruktur yang secara bersama-sama melemahkan ketahanan pangan rumah tangga petani. Kemiskinan struktural yang persisten berdampak pada rendahnya ketahanan pangan, yang berimplikasi pada minimnya pemanfaatan pangan lokal secara optimal. Di sisi lain, pangan lokal di TTU berupa jagung, ubi kayu, sorgum, dan umbi-umbian memiliki potensi strategis yang hanya dapat dioptimalkan melalui partisipasi dan kolaborasi kuat antara masyarakat dan pemerintah.

Kerangka berpikir penelitian ini menempatkan kemiskinan struktural sebagai variabel konteks yang mempengaruhi kondisi ketahanan pangan, pangan lokal sebagai instrumen strategis potensial, serta partisipasi dan kolaborasi masyarakat-pemerintah sebagai faktor penggerak utama menuju pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Alur logis hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.

Kerangka Berpikir Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam mengenai kondisi empiris masyarakat, khususnya terkait pengalaman, persepsi, dan praktik pengelolaan pangan lokal sebagai strategi bertahan hidup di tengah tekanan kemiskinan struktural. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dipilih secara *purposive* karena memiliki tingkat kemiskinan tertinggi kedua di NTT dan potensi pangan lokal berbasis lahan kering yang signifikan namun belum optimal.

Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2026, berlokasi di kantor Bapperida, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU, serta di Desa Bijeli, Kecamatan Noemuti dan Desa Eban, Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara. Informan dipilih secara *purposive sampling* sebanyak tujuh orang yang terdiri dari tiga informan kunci dari instansi pemerintah: (1) Bapak Samuel J. Tomasowa, SKM, selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida; (2) Ibu Melly, selaku Sekretaris Dinas Pertanian; dan (3) Ibu Ir. Marselina Sumu, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Empat informan pendukung berasal dari kalangan petani/rumah tangga miskin, yaitu Ibu Maria Tnaob, Ibu Rita, Ibu Ota, dan Bapak Joni Kase. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan 15 pertanyaan bagi setiap informan, berlangsung rata-rata 45–90 menit per sesi, mencakup topik kondisi kemiskinan struktural, praktik pengelolaan pangan lokal, program pemerintah, dan partisipasi masyarakat. Kedua, observasi lapangan langsung di wilayah pertanian untuk mengamati kondisi lahan, infrastruktur, dan praktik pertanian. Ketiga, studi dokumentasi terhadap data sekunder BPS Kabupaten TTU, BPS Provinsi NTT, Dinas Pertanian, dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten TTU.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi empat tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan melakukan coding tematik terhadap transkrip wawancara untuk mengidentifikasi pola-pola berulang dan kategori-kategori utama. Keabsahan data dijamin melalui empat kriteria: kredibilitas (dengan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode), transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan Struktural dan Dampaknya terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten TTU

Temuan penelitian ini secara konsisten mengkonfirmasi bahwa kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara bukan merupakan persoalan kultural semata, melainkan kemiskinan struktural yang berakar pada kegagalan sistem dalam menyediakan akses yang setara terhadap sumber daya produktif. Persentase kemiskinan TTU sebesar 20,17 persen pada tahun 2025 jauh melampaui rata-rata nasional (8,47 persen) maupun rata-rata Provinsi NTT (18,60

persen). Kondisi ini bersifat persisten, berlangsung lintas generasi, dan mencerminkan akumulasi keterbatasan struktural yang saling memperkuat satu sama lain.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan seluruh informan dan observasi lapangan, teridentifikasi tujuh karakteristik utama kemiskinan struktural di Kabupaten TTU yang saling terkait secara kausal: (1) persistensi dan watak lintas generasi kemiskinan; (2) ketergantungan pada pertanian subsisten lahan kering; (3) keterbatasan akses terhadap modal dan sarana produksi; (4) rendahnya kualitas sumber daya manusia; (5) kelemahan infrastruktur dan keterisolasian wilayah; (6) ketergantungan pada bantuan pemerintah dan mentalitas pasif; serta (7) kerawanan pangan musiman dan defisit gizi. Karakteristik-karakteristik ini membentuk lingkaran kemiskinan yang saling mengunci sebagaimana digambarkan Suparmono (2018) dalam konsep *vicious circle of poverty*. Informan dari Dinas Pertanian, Ibu Melly menegaskan kondisi ini:

"Kemiskinan TTU masih di atas rata-rata provinsi NTT, berakar pada keterbatasan akses lahan produktif, rendahnya SDM, minimnya infrastruktur dan akses permodalan."

Kondisi kemiskinan yang persisten ini secara nyata diperparah oleh pembentukan mentalitas ketergantungan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Ibu Ir. Marselina Sumu menyampaikan bahwa:

"Kemiskinan bersifat persisten, ketergantungan pada bantuan tunai pemerintah membentuk mental lemah dalam program pemberdayaan."

Kemiskinan struktural ini secara langsung melemahkan empat pilar ketahanan pangan: ketersediaan (*availability*), akses (*access*), pemanfaatan (*utilization*), dan stabilitas (*stability*). Data lapangan mengungkapkan bahwa masyarakat hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan selama 6 hingga 8 bulan dalam setahun dari hasil pertanian sendiri. Selebihnya, mereka harus bergantung pada bantuan sosial atau mengurangi konsumsi secara drastis. Realitas pahit ini terkonfirmasi dari pengakuan langsung Ibu Maria Tnaob mengatakan:

"Pernah kekurangan pangan; saat hasil kebun rusak karena hujan tidak tepat waktu; harus kurangi makan, orang tua makan lebih sedikit demi anak-anak."

Temuan ini selaras dengan perspektif Sen (1981) bahwa kegagalan ketahanan pangan lebih banyak disebabkan oleh kegagalan akses dan *entitlement* daripada semata-mata kekurangan produksi. Meskipun Kabupaten TTU secara potensial memiliki basis produksi pangan yang cukup, kemiskinan struktural mencegah rumah tangga miskin untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara optimal.

Tabel 1.

Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di NTT (Rp/kapita/bulan) 2020–2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Δ (%)
Timor Tengah Utara	386.990	394.818	440.155	485.744	499.772	+29,1%
Belu	380.000	395.000	440.000	480.000	495.000	+30,3%
Kupang (Kab.)	365.000	380.000	425.000	465.000	478.000	+30,9%
Kota Kupang	480.000	495.000	555.000	610.000	625.000	+30,2%
NTT (Rata-rata)	360.000	375.000	420.000	460.000	475.000	+31,9%

Sumber: BPS Kabupaten TTU, BPS NTT; data diolah peneliti (2026)

Tabel 1 menunjukkan bahwa garis kemiskinan TTU secara konsisten berada di atas rata-rata NTT dalam setiap tahun pengamatan, mengindikasikan bahwa biaya pemenuhan

kebutuhan dasar di TTU relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten lain di provinsi yang sama. Keterisolasian wilayah meningkatkan biaya distribusi pangan dan barang kebutuhan pokok, sehingga masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak untuk memenuhi standar hidup minimum yang sama. Merujuk pada pola nasional BPS di mana komponen Garis Kemiskinan Makanan (GKM) rata-rata menyumbang 73–75 persen dari total GK, estimasi GKM TTU tahun 2024 sekitar Rp369.831 per kapita per bulan. Angka ini mempertegas urgensi pengembangan pangan lokal yang dapat diproduksi secara mandiri, mengingat potensi penghematan pengeluaran pangan mencapai Rp50.000–Rp100.000 per kapita per bulan atau setara 10–20 persen dari garis kemiskinan makanan.

Potensi dan Kendala Pangan Lokal di Kabupaten TTU

Masyarakat Kabupaten TTU memiliki tradisi yang kuat dalam memanfaatkan pangan lokal. Komoditas yang secara rutin dikonsumsi meliputi jagung, ubi kayu, ubi jalar, keladi (talas), dan pisang. Para petani mengungkapkan praktik pengelolaan pangan lokal mereka yang masih sangat sederhana, Ibu Maria Tnaob dan Bapak Joni Kase mengatakan:

"Kami biasa menanam di kebun seperti keladi, singkong, ubi, pisang."

"Saya sendiri menanam di lahan kebun macam padi di sawah, jagung, ubi."

Pengolahan pangan yang dilakukan masih sangat terbatas, sebagaimana diakui secara jujur oleh salah satu informan Ibu Maria Tnaob:

"Direbus atau dibakar. Sederhana, yang penting bisa dimakan dan mengenyangkan."

Tabel 2.

Produksi Komoditas Pangan Lokal Kabupaten TTU Tahun 2023–2025 (Ton)

Komoditas	2023	2024	2025	Tren
Padi	39.650	41.240	49.450	Meningkat signifikan
Jagung	37.244	39.450	36.406	Fluktuatif, menurun 2025
Ubi Kayu	50.250	50.465	40.319	Menurun, perlu perhatian
Ubi Jalar	1.893	2.280	1.675	Fluktuatif
Sorgum	30	65	71	Tren positif, adaptif kering

Sumber: BPS Kabupaten TTU, 2026; data diolah peneliti

Tabel 2 memperlihatkan bahwa jagung merupakan komoditas dengan luas tanam terbesar (31.870 hektar) dengan produksi 36.406 ton, sementara ubi kayu membukukan produksi tertinggi sebesar 40.319 ton dengan rata-rata hasil 127,55 kw/ha. Namun terdapat kesenjangan yang signifikan antara luas tanam jagung (31.870 ha) dan luas panen (18.377 ha), yang mengindikasikan rasio panen hanya 57,7 persen cerminan nyata betapa besarnya potensi produksi yang hilang akibat kekeringan, serangan hama, dan keterbatasan modal untuk membeli sarana produksi. Penurunan produksi ubi kayu dari 50.465 ton (2024) menjadi 40.319 ton (2025) dan penurunan kacang hijau dari 86 ton menjadi 70 ton perlu mendapat perhatian serius, mengingat kedua komoditas ini merupakan sumber gizi penting bagi kelompok miskin. Sebaliknya, tren positif sorgum yang meningkat dari 30 ton (2023) menjadi 71 ton (2025) memberi harapan akan munculnya komoditas tangguh yang sesuai agroklimat kering TTU.

Stigma sosial menjadi hambatan kultural yang secara aktif menghambat diversifikasi pangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ibu Ir. Marselina Sumu mengungkapkan bahwa:

"Pangan lokal dianggap 'makanan kelas bawah', masyarakat tetap pilih beras, nilai tambah rendah, program berbasis proyek/bantuan, tidak mendorong kemandirian."

Temuan ini selaras dengan Azhari dkk. (2025) yang menemukan bahwa masyarakat miskin di NTT mengandalkan pangan lokal sebagai mekanisme adaptasi utama terhadap tekanan kemiskinan struktural, bukan semata karena pilihan, melainkan karena ketiadaan akses terhadap pilihan lain yang lebih baik. Kondisi ini mencerminkan relevansi peringatan Malthus (1798) tentang kesenjangan antara kapasitas produksi pangan yang stagnan dan kebutuhan konsumsi yang terus berkembang, yang di TTU lebih banyak disebabkan oleh stagnasi teknologi dan keterbatasan modal daripada overpopulasi semata.

Partisipasi Masyarakat dan Kolaborasi dengan Pemerintah

Pemerintah Kabupaten TTU telah menjalankan berbagai program intervensi, antara lain bantuan benih jagung dan kacang melalui APBD, Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), penguatan lumbung pangan desa, kartu tani subsidi pupuk, Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), Festival Pangan Lokal TTU, serta kemitraan dengan perguruan tinggi untuk inovasi produk jagung dan ubi. Meskipun demikian, efektivitasnya dinilai masih terbatas. Sekretaris Dinas Pertanian, Ibu Melly mengungkapkan:

"Efektivitas terbatas, benih meningkatkan produksi di beberapa kecamatan, KRPL belum merata, keberlanjutan lemah, dan rendahnya partisipasi perempuan."

Dari perspektif masyarakat penerima manfaat, bantuan memang dirasakan, namun tidak berkelanjutan dan tidak disertai pendampingan yang memadai. Dua informan dari kalangan petani Ibu Maria Tnaob dan Bapak Joni Kase menegaskan kondisi ini:

"Cukup membantu tapi hanya sekali-sekali, setelah itu kembali seperti biasa; tidak ada pendampingan terus-menerus."

"Cukup membantu namun belum maksimal menuntaskan ketersediaan pangan dan alat pertanian."

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan, tingkat partisipasi masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan berbasis pangan lokal dapat dikategorikan ke dalam tiga level. Pertama, partisipasi tinggi (15 persen): petani aktif dalam kelompok tani, terlibat dalam Musrenbangdes, dan mulai memasarkan hasil produksi. Kedua, partisipasi sedang (25 persen): petani terdaftar sebagai penerima manfaat namun keterlibatan tidak konsisten. Ketiga, partisipasi rendah (60 persen): mayoritas masyarakat bersifat pasif, hanya berpartisipasi saat ada bantuan material langsung dan kembali ke kondisi semula setelah program berakhir. Kategorisasi ini bukan semata-mata hasil perhitungan kuantitatif, melainkan diperoleh melalui triangulasi antara laporan Dinas Pertanian, data kelompok tani, dan konfirmasi wawancara lintas informan.

Evaluasi kritis terhadap program yang ada mengungkapkan tiga permasalahan mendasar. Pertama, program cenderung berbasis pemberian input tanpa pendampingan teknis berkelanjutan, sehingga setelah program berakhir, masyarakat kembali ke kondisi semula. Kedua, koordinasi lintas-OPD masih lemah, ditandai tumpang tindih program dan fragmentasi data yang menghambat perencanaan berbasis bukti. Ketiga, dominasi beras impor dalam program bantuan sosial secara tidak langsung menghambat pengembangan pangan lokal.

Kondisi ini selaras dengan temuan Pujiyanto dkk. (2025) yang menyatakan bahwa ketergantungan pada pangan impor memperburuk kemiskinan struktural di tingkat desa dan merekomendasikan diversifikasi berbasis potensi lokal sebagai strategi pembangunan berkelanjutan. Zamharira dkk. (2024) menegaskan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan yang efektif harus mengintegrasikan secara sinergis pemenuhan kebutuhan pangan, pembangunan infrastruktur lokal, dan peningkatan kapasitas komunitas—tiga elemen yang di TTU masih berjalan secara parsial dan tidak terkoordinasi.

Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Pangan Lokal sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan

Kabupaten TTU memiliki keunggulan komparatif dalam pengembangan pangan lokal berbasis lahan kering yang mencapai 199.583,2 hektar atau 74,7 persen dari total wilayah. Komoditas seperti jagung, sorgum, ubi kayu, dan berbagai umbi-umbian tidak hanya produktif dalam kondisi lahan kering, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem lokal karena tidak memerlukan input kimia berlebihan. Masyarakat petani sendiri meyakini potensi transformatif pangan lokal, hal ini diungkapkan oleh dua informan petani yakni Ibu Maria Tnaob dan Bapak Joni Kase mengatakan bahwa:

"Bisa, pangan lokal bisa dikonsumsi sendiri sehingga tidak perlu beli; kalau banyak bisa dijual untuk tambah uang."

"Iya, petani bisa bertahan hidup dari hasil sendiri dan sebagian dijual untuk penuhi kebutuhan ekonomi keluarga."

Berdasarkan sinergi temuan lapangan, terdapat empat instrumen strategis pengentasan kemiskinan berbasis pangan lokal yang perlu diimplementasikan secara integratif: (1) substitusi beras impor dalam bantuan sosial dengan pangan lokal jagung, sorgum, dan ubi sebagai langkah mematahkan dominasi impor sekaligus memberikan insentif produksi bagi petani lokal; (2) penguatan lumbung pangan desa sebagai penyangga kerawanan pangan musiman; (3) pengembangan agroindustri pangan lokal berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah; serta (4) pembangunan infrastruktur adaptasi iklim berupa embung, sumur bor, dan irigasi mikro untuk mengatasi kekeringan musiman. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Ibu Ir. Marselina Sumu merekomendasikan:

"Fokus komoditas adaptif lokal; penguatan infrastruktur embung, sumur bor, irigasi, alsintan skala kelompok; penguatan kelompok tani."

Terwujudnya pembangunan berkelanjutan berbasis pangan lokal di Kabupaten TTU memerlukan komitmen kebijakan jangka panjang yang melampaui siklus anggaran tahunan. Budiman dan Liyong (2023) menegaskan bahwa penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal tidak hanya mendukung keamanan pangan, tetapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru. Dimas dkk. (2024) menekankan bahwa strategi pengentasan kemiskinan struktural yang efektif harus mencakup pemberdayaan ekonomi lokal, penguatan kelembagaan desa, dan integrasi pangan lokal dalam kebijakan ketahanan pangan daerah. Diperlukan visi bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha untuk membangun ekosistem pangan lokal yang kompetitif dari hulu (produksi) hingga hilir (pengolahan dan pemasaran).

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan dua temuan utama yang saling berkaitan. Pertama, kemiskinan struktural di Kabupaten Timor Tengah Utara terbukti berpengaruh signifikan terhadap lemahnya ketahanan pangan masyarakat. Kemiskinan tersebut bersifat persisten, berakar pada keterbatasan akses lahan produktif, rendahnya kualitas SDM, infrastruktur yang belum memadai, dan dominasi pertanian subsisten berbasis lahan kering. Meskipun pangan lokal seperti jagung, ubi kayu, sorgum, dan kacang-kacangan memiliki potensi strategis yang signifikan, pemanfaatannya masih subsisten dan belum dioptimalkan sebagai sumber nilai tambah ekonomi. Persoalan ini diperparah oleh stigma sosial yang menempatkan pangan lokal sebagai komoditas inferior, menghambat diversifikasi konsumsi yang sesungguhnya sangat dibutuhkan.

Kedua, partisipasi dan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan belum berjalan optimal. Program pemerintah cenderung bersifat jangka pendek, minim pendampingan berkelanjutan, dan belum terintegrasi secara kohesif antarinstansi. Partisipasi masyarakat didominasi oleh posisi pasif sebagai penerima manfaat (60 persen kategori rendah), dengan hanya 15 persen yang terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan di TTU memerlukan pendekatan sistemik dan berkelanjutan yang menempatkan pangan lokal sebagai aset strategis, bukan alternatif darurat, serta mendorong transisi masyarakat dari penerima manfaat pasif menjadi agen aktif pembangunan yang berdaya.

Saran dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, diajukan beberapa rekomendasi kebijakan yang spesifik dan terukur. Bagi pemerintah daerah, diperlukan reformasi paradigma bantuan sosial dari berbasis beras impor menuju pangan lokal (substitusi jagung, sorgum, ubi dalam paket bantuan), integrasi pangan lokal dalam program bansos sebagai langkah strategis meningkatkan insentif produksi petani lokal, penguatan dan perluasan program lumbung pangan desa di seluruh kecamatan sebagai buffer ketahanan pangan musiman, serta peningkatan jumlah dan kualitas penyuluh pertanian lapangan yang saat ini masih sangat terbatas.

Bagi instansi teknis (Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan), diperlukan program pengembangan agroindustri sorgum lokal mengingat tren pertumbuhannya yang positif dan ketahanannya terhadap kekeringan, pembangunan infrastruktur adaptasi iklim berupa embung dan irigasi mikro untuk mengatasi kekeringan musiman yang menjadi penyebab utama gagal panen, serta penguatan BUMDes berbasis pangan lokal sebagai kelembagaan ekonomi desa yang mampu mengelola rantai nilai dari produksi hingga pemasaran. Bagi penelitian selanjutnya, kajian ini dapat dikembangkan dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur dampak kebijakan pangan lokal secara lebih terukur dan komparatif di wilayah lain dengan karakteristik serupa di Provinsi NTT.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahdiat, A. (2025). *10 Provinsi dengan Angka Kemiskinan Tertinggi Awal 2025*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2025/08/19/10-provinsi-dengan-angka-kemiskinan-tertinggi-awal-2025> (diakses 15 Maret 2026 pukul 17.45)
- Alessandrini, S. (2024). *Smallholder Farms in the Sustainable Food Transition: A Critical Examination of the New Common Agricultural Policy*. *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, 33(1), 124–135. <https://doi.org/10.1111/reel.12539>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2025). *NTT Dalam Angka 2025*. BPS Provinsi NTT.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025*. BPS RI. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/15/2428/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2025.html>
- Beckford, C., Al Jawaldeh, A., & Lipoeto, N. I. (2024). Editorial: Nutrition and Sustainable Development Goal 1: No poverty. *Frontiers in Nutrition*, 11, 1466774. <https://doi.org/10.3389/fnut.2024.1466774>
- Budiman, S., & Liyong, Y. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. *Jurnal Pemberdayaan*, 2(2), 60–73. <https://doi.org/10.17509/ijom.v6i2.86162>
- Chambers, R. (1983). *Rural Development: Putting the Last First*. Longman.
- Dewi, I. M., Lisdiana, & Sakir, I. M. (2024). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lawang Kidul. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 10(2), 118–128. <https://doi.org/10.23887/jiis.v10i2.79706>
- Dimas, E., Pratama, R., & Izharun. (2024). Tantangan dan Strategi Penanganan Kemiskinan Struktural dalam Mewujudkan Pembangunan Sosial Inklusif. *Journal of Mandalika Social Science*, 2(2025), 65–71. <https://doi.org/10.59613/jomss.v3i1.261>
- Embang, A. E. (2025). *Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Sosiologi dan Tantangan Global*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Enthoven, L., & Van den Broeck, G. (2021). Local food systems: Reviewing two decades of research. *Agricultural Systems*, 193, 103226. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.103226>
- Godfray, H. C. J., Beddington, J. R., Crute, I. R., Haddad, L., Lawrence, D., Muir, J. F., Pretty, J., Robinson, S., Thomas, S. M., & Toulmin, C. (2010). *Food security: The challenge of feeding 9 billion people*. *Science*, 327(5967), 812–818. <https://doi.org/10.1126/science.1185383>
- Heavey, K. (2022). Is Doomsday Approaching? A Critique of Malthus. *MEST Journal*, 10(2), 81–91. <https://doi.org/10.12709/mest.10.10.02.09>
- Hefferon, K. L., Downs, S., Oms Oliu, G., & De Steur, H. (2021). Editorial: Sustainable Development Goals (SDGs): Impact on nutrition. *Frontiers in Nutrition*, 8, 676080. <https://doi.org/10.3389/fnut.2021.676080>
- Hlatshwayo, S. I., Ngidi, M. S. C., Ojo, T. O., Modi, A. T., Mabhaudhi, T., & Slotow, R. (2023). The Determinants of Crop Productivity and Its Effect on Food and Nutrition

- Security in Rural Communities of South Africa. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 7, 1091333. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1091333>
- Klimczuk, A., Gawron, G. P., & Toczyski, P. (2024). Editorial: Towards 2030: Sustainable Development Goal 1: No Poverty. A Sociological Perspective. *Frontiers in Sociology*, 9, 1487228. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1487228>
- Li, J., & Song, W. (2022). Food security review based on bibliometrics from 1991 to 2021. *Foods*, 11(23), 3915. <https://doi.org/10.3390/foods11233915>
- Malthus, T. R. (1798). *An Essay on the Principle of Population*. J. Johnson.
- Nyamamu, E. J., Nchimbi, C. S., Mteti, S. H., & Ndimbo, G. K. (2025). Potentials and Challenges for Rural Livelihood Diversification and Poverty Alleviation in Sub-Saharan Africa: A Systematic Review. *SAGE Open*, 15(3). <https://doi.org/10.1177/21582440251379011>
- Pinstrup-Andersen, P. (2009). Food security: Definition and measurement. *Food Security*, 1(1), 5–7. <https://doi.org/10.1007/s12571-008-0002-y>
- Pujiyanto, M. A., Setyorini, F. A., Azizi, E. S., Fitria, A., Solekan, M., Kinding, D. P. N., & Permana, F. (2025). Strategi Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Jawa Tengah: Menangani Inflasi, Kemiskinan dan Kekurangan Gizi. *Jurnal AGRIFO*, 10(2), 70–82. <https://doi.org/10.29103/ag.v10i2.21569>
- Purba, B., Sihombing, A. E., Azizah, L. N., & Purba, A. A. (2024). Analisis Penerapan serta Hambatan Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Klasik terhadap Sistem Ekonomi Masa Kini. *Jurnal El-Mujtama*, 4(3), 1234–1245. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i3.1151>
- Ramadani, E. D. (2025). Menghadapi Tantangan Ketahanan Pangan: Relevansi Teori Populasi Malthus bagi Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi FEB Unesa*. <https://pe.feb.unesa.ac.id/post/menghadapi-tantangan-ketahanan-pangan-relevansi-teori-populasi-malthus-bagi-indonesia>
- Righettini, M. S., & Bordin, E. (2022). Exploring food security as a multidimensional topic: Twenty years of scientific publications and recent developments. *Quality & Quantity*, 57(4), 3007–3028. <https://doi.org/10.1007/s11135-022-01452-3>
- Ruja, I. N., Sumarmi, & Idris. (2024). Programs, Opportunities, and Challenges in Poverty Reduction: A Systematic Review. *SAGE Open*, 14(3). <https://doi.org/10.1177/21582440241256242>
- Salsabela, P., Alvito, K. Y., Setiawaty, E., & Malik, A. (2024). Implementasi Kemiskinan dan Stabilitas Pangan di Indonesia. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, November, 9063–9072.
- Sen, A. (1981). *Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation*. Oxford University Press.
- Sembiring, A. C., Utama, L. J., & Nur, A. (2026). Ketahanan Pangan pada Rumah Tangga Petani di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Pangan*, 35(1). <https://doi.org/10.33964/jp.v35i1.966>
- Siregar, L. A., Wulandari, D., & Retnaningsih, C. (2025). Ketahanan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal: Studi Literatur sebagai Transformasi Pangan Menuju Indonesia Maju 2045. *Prosiding Seminar Nasional Sanata Dharma Berbagi (USDB)*, 3, 403–421.

- Suleman, D., Bakari, Y., Boekoesoe, Y., Abidin, Z., Lestari, P. F. K., & Meisanti. (2025). *Pengantar Agribisnis dan Ketahanan Pangan*. Widina Media Utama.
- Suparmono. (2018). *Pengantar Ekonomi Makro (Edisi Kedua)*. UPP STIM YKPN.
- Unat, E. (2020). A review of Malthusian theory of population under the scope of human capital. *FORCE: Focus on Research in Contemporary Economics*, 1(1), 1–19. <https://doi.org/10.47667/force.v1i1.14>
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 227.
- Webb, P., Benton, T. G., Beddington, J., Flynn, D., Kelly, N. M., & Thomas, S. M. (2020). The urgency of food system transformation is now irrefutable. *Nature Food*, 1(10), 584–585. <https://doi.org/10.1038/s43016-020-00161-0>
- Westskog, H. (2024). Local food systems and community development: A symbiotic relation? A case study of three rural municipalities in Norway. *The International Journal of Sociology of Agriculture and Food*, 30(1), 19–42. <https://doi.org/10.48416/ijf.v30i1.534>
- World Bank. (2022). *Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting Course*. The World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity>
- Wudil, A. H., Ali, A., Aderinoye-Abdulwahab, S., Raza, H. A., Mehmood, H. Z., & Sannoh, A. B. (2023). Determinants of food security in Nigeria: Empirical evidence from beneficiaries and non-beneficiaries rice farmers of the Kano River Irrigation Project. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 7, 999932. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.999932>
- Zamharira, C., Khalil, Z. F., & Nufus, H. (2024). Tantangan dan Strategi: Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Aceh Utara. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 14, 181–197. <https://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/437>